



LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Jalan Jenderal Sudirman No. 02 RT. 04
Kelurahan Melayu - Tenggarong



dp2kbkukar@gmail.com



<https://dp2kb.kukarkab.go.id>



Dppkb Kutai Kartanegara



dppkb_kutai_kartanegara

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN
2022



Berencana Itu keren



KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan mata, lisan dan pikiran kepada hamba-NYA, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 .

Laporan ini merupakan perwujudan kegiatan suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggung-jawaban secara periodic dan pada tahun 2022 ini adalah masa terakhir periode RENSTRA.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini, oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun akan senantiasa kami terima untuk perbaikan laporan dimasa yang akan datang.

Semoga LKjIP yang kami susun dapat memberikan gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, dan dapat memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kinerja yang lebih baik ditahun berikutnya.

Tenggarong, 24 Februari 2022

Kepala,

Drs. Adinur, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650210 199003 1 016





DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
 BAB I PENDAHULUAN	 3
I. LATAR BELAKANG	3
II. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	3
III. MAKSUD DAN TUJUAN LKjIP 2021	6
IV. SISTEMATIKA PENYAJIAN	6
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	 8
I. RENCANA STRATEGIS	8
II. PENETAPAN KINERJA	12
 BAB III CAPAIAN KINERJA	 14
I. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	14
II. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS	27
III. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	34
 BAB IV PENUTUP	 40

LAMPIRAN – LAMPIRAN





DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel – 1. Pencapaian Sasaran Strategis	2
Tabel – 2. Tujuan dan Sasaran	10
Tabel – 3. Uraian Strategi RENSTRA dan Keterkaitan Dengan Strategi RPJMD	10
Tabel – 4. Sasaran Strategi Beserta Indikator Kinerja Bidang Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12
Tabel – 5. Pengukuran Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	14
Tabel – 6. Formulir Pengukuran Kinerja Program Pelayanan Administrasi	15
Perkantoran	
Tabel – 7. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Pada Program Pelayanan	15
Administrasi Perkantoran	
Tabel – 8. Formulir Pengukuran Kinerja Program Peningkatan Sarana dan	16
Prasarana Aparatur	
Tabel – 9. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Pada Program Peningkatan	17
Prasarana Aparatur	
Tabel – 10. Formulir Pengukuran Kinerja Program Peningkatan Kualitas Sumber	18
Daya Aparatur	
Tabel – 11. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Pada Program Peningkatan	18
Kualitas Sumber Daya Aparatur	
Tabel – 12. Formulir Pengukuran Kinerja Program Pengembangan Sistem Pelaporan .	19
Capaian Kinerja dan Keuangan	
Tabel – 13. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Pada Program Pengembangan	19
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
Tabel – 14. Formulir Pengukuran Kinerja Program Keluarga Berencana	20
Tabel – 15. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Pada Program Keluarga	21
Tabel – 16. Formulir Pengukuran Kinerja Program Peningkatan Kualitas	21
Kesehatan Reproduksi	
Tabel – 17. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Pada Program Peningkatan	22
Kualitas Kesehatan Reproduksi	
Tabel – 18. Formulir Pengukuran Kinerja Program Pengendalian Penduduk	22
Tabel – 19. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Pada Program Pengendalian	23
Penduduk	
Tabel – 20. Formulir Pengukuran Kinerja Program Advokasi, Pergerakan dan	24
Informasi	
Tabel – 21. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Pada Program Advokasi,	25
Pergerakan dan Informasi	
Tabel – 22. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Pada Program Ketahanan dan	25
Pemberdayaan Keluarga	
Tabel – 23. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Pada Program Ketahanan.....	26
Dan Pemberdayaan Keluarga	
Tabel – 24. Formulir Pengukuran Kinerja Sasaran 1	29
Tabel – 25. Formulir Pengukuran Kinerja Sasaran 2	30
Tabel – 26. Jumlah PLKB / PKB	33
Tabel – 27. Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2021	34
Tabel – 28. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021	35
Tabel – 29. Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	39
Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2017 - 2021	





DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik – 1. Persentase Keluarga Berencana Aktif Per Pasangan Usia Subur (PUS)	30
Grafik – 2. Jumlah Peserta KB Aktif Di Setiap Kecamatan	31
Grafik – 3. Komposisi Jenis Kontrasepsi Yang Digunakan Akseptor KB	32





DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar – 1. “TOKO KENCANA” (TEMPAT OBROLAN DAN KOMUNIKASI KELUARGA BERENCANA.....	28
Gambar – 2. Pelayanan KB Dalam Rangka Meningkatkan Angka Kesertaan Ber-KB	29
Gambar – 3. Pelayanan KB Gratis Bagi Keluarga Miskin	33
Gambar – 4. Petugas KB Saat Memberikan Pelayanan KB Gratis	32
Gambar – 5. Pencanangan Kampung KB Percontohan “ Bina Sejahtera “	32





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara atas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan pencapaian kinerja DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 terhadap Penetapan Kinerja tahun 2022 serta analisis atas capaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 – 2026.

Pembuatan Laporan Kinerja ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Adapun komponen yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini meliputi dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja serta Capaian Kinerja selama tahun 2020 - 2022. DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan sebanyak 4(Empat) Sasaran Strategis dengan 4(Empat) Indikator yang mendukung Sasaran Strategis sebagaimana pada Tabel – 1.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama menunjukkan bahwa **Rasio Peserta KB Aktif** di Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2022 mengalami capaian yang menurun, dimana dari target Rasio Peserta KB Aktif pada tahun 2022 berdasarkan RENSTRA sebesar **65870 Akseptor** terealisasi sebesar **65,48 %**, atau capaian target sebesar **64,70 %** dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 65870 akseptor dan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 100590. Angka ini mengalami penurunan sebesar **0,98 %** dari capaian tahun 2020 sejak berdirinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk indikator Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Pra Sejahtera I yang ikut ber Keluarga Berencana pada tahun 2022 mencapai angka **9,33%** dari target sebesar **15,50 %** atau tercapai sebesar **60,19 %**.





Tabel – 1.
Pencapaian Sasaran Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target / Capaian Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur(PUS)	Meningkatnya kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur(PUS)	Menurunnya Angka kelahiran Total(TFR) Per WUS(15-49 tahun)	2,27 (Target) 2,53 (Capaian)	2,20 (Target) 2,39 (Capaian)	2,18 (Target)	2,16 (Target)	2,14 (Target)
2	Meningkatkan peran stakeholder dalam Program BANGGA KENCANA	Meningkatnya peran stakeholder dalam Program BANGGA KENCANA	Persen tase Cakup an stakeholder yang terliba t dalam Progra m BANG GA KENCA NA	78,00 (Target)	30 (Target)	35 (Target)	40 (Target)	45 (Target)
3	Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga	Indek Pembangun an Keluarga	57 (Target)	57,50 (Target)	58,50 (Target)	60 (Target)	63 (Target)
4	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP DPPKB	80 (Target)	85,10 (Target)	85,40 (Target)	85,55 (Target)	86,70 (Target)





Berdasarkan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan alokasi anggaran semula sebesar Rp. 21.214.878.966,00 yang terdiri mendukung pelaksanaan 4 (Empat) Program, dan 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 57 (Lima Puluh tujuh) Sub Kegiatan. Setelah anggaran perubahan melalui APBD – P Tahun 2022 berubah menjadi Rp. 21.214.878.966,00 Belanja Langsung dengan jumlah program sebanyak 4 (Empat) Program, dan 17 (tujuh Belas) Kegiatan dan 55 (Lima Puluh Lima) Sub Kegiatan Sub Kegiatan. Adapun Realisasi belanja secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 15.287.548.742 (78,50 %) dari total anggaran sebesar Rp. 21.214.878.966,00.





BAB I PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) beserta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera – Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara wajib mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

II. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya di jabarkan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, adalah sebagai berikut :

A. KEDUDUKAN

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala, yang didalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris dan Tiga Kepala Bidang.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



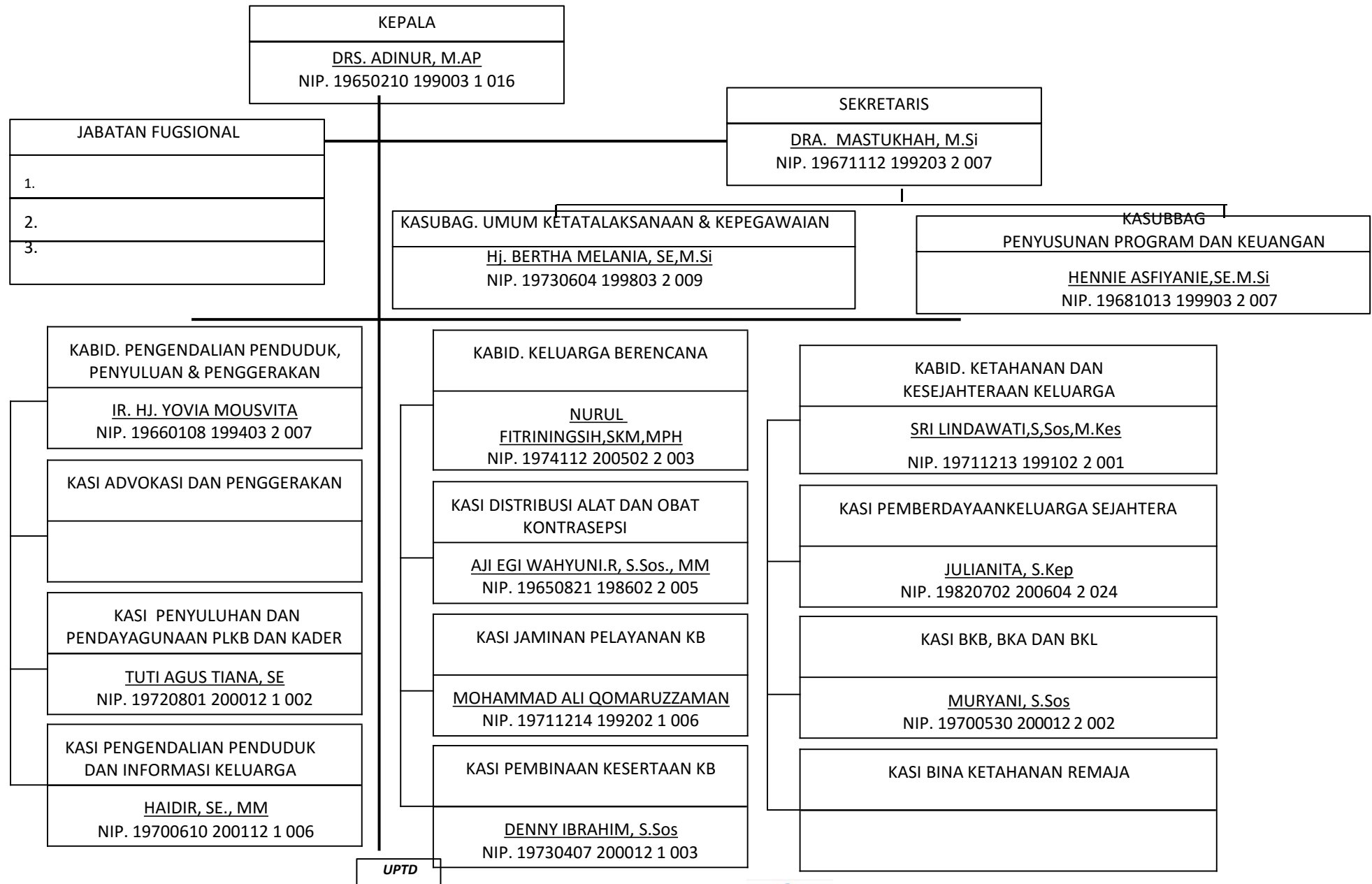


- Fungsi** : Dalam melaksanakan kewenangannya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 2. Pelaksanaan kebijakan dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.





1. STRUKTUR ORGANIASI





Dalam melaksanakan tugasnya Kepala DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dibantu oleh Sekretaris dan Tiga (3) orang Kepala Bidang yaitu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Kepala Bidang Keluarga Berencana serta Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sementara untuk tugas lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala DPPKB serta dibantu oleh :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawian
 - b. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas membantu Kepala DPPKB serta dibantu oleh :
 - a. Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan
 - b. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
 - c. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
3. Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala DPPKB serta dibantu oleh :
 - a. Kepala Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
 - b. Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB
 - c. Kepala Seksi Pembinaan dan Kesertaan KB
4. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala DPPKB serta dibantu oleh :
 - a. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
 - b. Kepala Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansia
 - c. Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja
5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas selain membantu Kepala DPPKB mereka juga bertugas berdasarkan keahlian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. KEUANGAN

Jumlah anggaran belanja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 sebesar Rp. 21.214.878.966,00 dengan realisasi sebesar Rp.15.287.458.742,00 atau 78,50% dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

Belanja Operasi	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Belanja pegawai	7.224.977.106,00	6.859.692.501,0	365.284.605
Belanja Barang /Jasa	8.062.481.636,00	6.053.422.376,00	2.009.059.260
Belanja Modal	1.542.499.457,00	2.092.041.300,00	(549.541.843)
Jumlah	16.829.958.199,00	15.005.156.177,00	1.824.802.022





V. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana penunjang Pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut

VI. ISU ISU STRATEGIS

Beberapa Isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan sesuai dengan hak reproduksi
2. Perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
3. Mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga yang berkualitas menghasilkan keluarga yang berketahanan

MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjiP) TAHUN 2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera – Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Maksud dan tujuan LkjiP ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara serta sebagai bahan masukan dalam upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperbaiki lebih meningkatkan di masa datang.

ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA DPPKB

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sampai dengan 31 Desember 2022, tercatat sebanyak 128 orang, meliputi 56 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 12 orang P3K, 13 orang PNS Petugas Lapangan (PKB), 34 orang Non PNS penyuluh lapangan dan 13 orang THL Kantor. Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut jenjang pendidikan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagai berikut : SLTA sebanyak 33 orang, Diploma III sebanyak 2 orang, Sarjana 1 sebanyak 67 dan Sarjana Sarjana 2 sebanyak 13 Orang.

VII. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya LkjiP ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara selama Tahun 2022 dan pencapaian terhadap rencana jangka menengah.





Capaian kinerja (performance results) Tahun 2022 dan pencapaian terhadap rencana jangka menengah (RENSTRA) tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2022 dan target RENSTRA sebagai tolak ukur keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabuapten Kutai Kartanegara dalam tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penanaman modal.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabuapten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabuapten Kutai Kartanegara dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LkjIP 2022.

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabuapten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabuapten Kutai Kartanegara Tahun 2022.

Bab III – Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban kinerja terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2022 dan selama masa periode RENSTRA (Tahun 2021 – 2026).

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabuapten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dan selama masa periode RENSTRA (Tahun 2021 – 2026) serta menguraikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

I. RENCANA STRATEGIS

A. GAMBARAN UMUM

Dalam gambaran umum Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabuaptan Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 secara umum merupakan alat pengambil keputusan dan sebagai langkah kongkrit yang akan ditempuh di waktu yang akan datang untuk mencapai sasaran ataupun tujuan yang di inginkan dengan memperhitungkan kondisi potensi, peluang dan kendala yang kemungkinan di hadapi, sehingga dapat di gunakan sebagai tolak ukur atas pelaksanaan suatu kegiatan dan mempermudah dalam mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan.

Dalam rangka pelaksanaan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini di jadikan sebagai instrumen pertanggung jawaban, perencanaan ini merupakan pengintergrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab perkembangan lingkungan strategis local, regional, nasional dan global serta berada dalam tatanan system dan kaidah manajemen nasional.

Maksud dan Tujuan dari rencana strategis untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga rencana strategis ini dapat memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit – unit organisasi dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, selain itu rencana strategis dapat mempermudah pengendalian, koordinasi, monitoring, analisis, evaluasi baik secara internal maupun eksternal.

B. TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Instrumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.
2. Tersusunnya sebuah dokumen yang akan menjadi panduan serta digunakan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Terciptanya pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi ke masa depan.
4. Terwujudnya komunikasi baik vertikal maupun horizontal antara unit kerja dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal serta proses pengambilan keputusan untuk pencapaian tujuan organisasi.





C. VISI DAN MISI

Sesuai dengan amanat undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai organisasi unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di bidang penanaman modal dan Promosi perlu secara terus menerus mengembangkan peluang, melakukan inovasi dan versifikasi agar dapat mengikuti perkembangan kemajuan zaman.

Meningkatnya persaingan, tantangan, hambatan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan itu harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Adapun Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga merupakan Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah

Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Perangkat Daerah yang bertugas dibidang penanaman modal dalam bentuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan mengetahui kebijakan dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Guna mewujudkan visi DPPKB 2016 – 2021 maka disusunlah misi yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya oleh sebab itu misi DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan sebagai berikut :

1. Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk rakyat.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten.

D. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka menjabarkan dan sekaligus mengimplementasikan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak terlepas dari sasaran strategis RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di bidang Keluarga Berencana, maka disusunlah sasaran strategis beserta indikator kinerja DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :





Tabel – 2.
Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja
Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur(PUS)	Meningkatnya kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur(PUS)	Menurunnya Angka kelahiran Total(TFR) per WUS(15-49 tahun)	2,20
2.	Meningkatkan peran stakeholder dalam program BANGGA KENCANA	Meningkatnyaperan stakeholder dalam program BANGGA KENCANA	Cakupan stakeholder dalam program BANGGA KENCANA	30
3.	Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan keluarga	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan keluarga	Indek Pembangunan Keluarga	57,50
4.	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP DPPKB	85,10

E. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan oleh organisasi di waktu yang akan datang strategi yang di lakukan DPPKB merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dalam system akuntabilitas kinerja pemerintah. Strategi merupakan langkah awal untuk melakukan evaluasi pelaksanaan visi, misi dan tupoksi organisasi yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan penyusunan rencana kerja yang lebih cermat dan akurat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi serta melakukan perencanaan strategik meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan yang mengintegrasikan segenap aktivitas pelaksanaan kegiatan DPPKB dan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab perkembangan lingkungan strategik regional, nasional dan global dalam tatanan system manajemen nasional.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam pencapaian tujuan dan arah kebijakan adalah sebagai berikut : strategik

Tabel – 3.
Uraian Strategi RENSTRA dan Arah Kebijakan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Mewujudkan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang tumbuh	Meningkatnya kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur(PUS)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas Penguatan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi BANGGA KENCANA





NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	seimbang,berkualitas dan daya saing			Peningkatan kualitas Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB
2.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kesertaan keluarga berencana	Peningkatan Kualitas Basis Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Peningkatan kualitas basis data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) BANGGA KENCANA
3.	Meningkatkan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya aksesibilitas keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 dalam program keluarga berencana	Peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Penguatan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi KKBPK Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas
4.	Mengoptimalkan pengendalian Penduduk	Optimalnya Pengendalian Penduduk	Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Penguatan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi KKBPK Peningkatan pembinaan ketahanan keluarga Peningkatan pembangunan keluarga

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh DPPKB untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Peningkatan sarana prasarana perkantoran sesuai dengan standar.
3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur.
4. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan.
5. Peningkatan kualitas basis data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
6. Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas.
7. Penguatan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi KKBPK.
8. Peningkatan pembinaan ketahanan keluarga.
9. Peningkatan pembangunan keluarga.

Adapun program kerja operasional yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditentukan sebagai arah dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang memberikan dukungan terhadap peningkatan kinerja. Program-program tersebut telah ditetapkan di RPJMD yang nantinya DPPKB hanya mengikuti arah pada program-program yang ada sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka program operasional yang akan dilaksanakan oleh DPPKB meliputi :





1. Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program kerja operasional diatas kemudian dijabarkan kembali menjadi kegiatan organisasi yang disusun dengan dimensi tahunan. Program tersebut merupakan yang berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi DPPKB Kaupaten Kutai Kartanegara, namun demikian masih dimungkinkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagaipenunjang, yaitu kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara rutin/ berkala tanpa harus dimasukkan didalam dokumen RENSTRA, kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadibahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja yang berdimensi lima (5) tahunan.

II. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Perjanjian kinerja Kepala DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tabel-4
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun)	Persen	2,20
2.	Meningkatnyaperan stakeholder dalam program BANGGA KENCANA	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program BANGAA KENCANA	Persen	30
3.	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga	Indek Pembangunan Keluarga	Nilai	57,50
4.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP DPPKB	Nilai	85,10





III. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2022

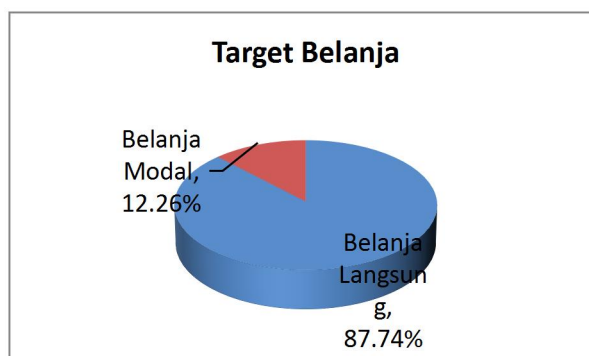
Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 sebesar Rp. 21.214.878.966,00 yang bersumber dari APBD.

1. Target Belanja

Jumlah anggaran belanja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 sebesar Rp. 21.214.878.966,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel - 5
Target Belanja DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

No	JENIS	ANGGARAN	Persentase
1.	Belanja Operasi	Rp. 19.473.324.625	78,50 %
2.	Belanja pegawai	Rp. 8.055.785.621	89,69%
3.	Belanja Barang /Jasa	Rp. 11.417.539.004	70,61%
4.	Belanja Modal	Rp. 1.741.554.341	88,57 %
5.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 765.516.400	87,00%
6.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 958.194.040	89,62%
7.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 17.843.901	99,57%
	Jumlah	Rp. 21.214.878.966	79,33 %



2. Alokasi Anggaran per Sasaran

Anggaran belanja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel – 6
Alokasi Anggaran per Sasaran

NO.	SASARAN	ANGGARAN	PERSENTASE
1.	Meningkatnya Kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur(PUS)	4.675.381.000	86,09
2.	Meningkatnya peran stakeholder	569.501.000	98,96





NO.	SASARAN	ANGGARAN	PERSENTASE
	dalam program kependudukan		
3.	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga	5.106.240.000	60,19
4.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	10.863.756.966	2,02

3. Alokasi Anggaran berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

DPPKB Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2022 merencanakan 4 (empat) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel – 7

Alokasi Anggaran berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2022

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PERSEN- TASE
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.863.756.966	62,48
1a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	281.648.000	2,59
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	138.468.000	49,16
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	35.880.000	12,74
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.360.000	9,04
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.976.000	29,10
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.535.762.621	69,36
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.132.835.621	94,65
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000	0,19
	Koordinasi dan penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31.342.000	0,41
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	346.585.000	4,59
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	0,13
c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	104.570.000	0,96
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	74.570.000	71,31
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000	28,68
d.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.888.000	0,55
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	59.888.000	0,1
e.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	455.693.618	4,19
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	135.000.000	29,62
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	10,97
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.800	4,38
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	209.200.818	45,90





NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PERSEN- TASE
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	41.493.000	9,10
f.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	385.545.900	3,54
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000	19,45
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	51,87
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.545.900	28,67
g.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.758.983.348	16,19
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.091.040	8,87
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	2,84
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.552.892.308	88,28
h.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.629.479	2,59
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.830.000	15,91
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.775.578	36,49
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134.023.901	47,58
2.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	569.501.000	2,68
2a.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	275.000.000	48,28
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	125.000.000	45,45
	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	50.000.000	18,18
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	50.000.000	18,18
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	50.000.000	28,40
b.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	294.501.000	51,71
	Penyediaan dan pengolahan Data Kependudukan	50.000.000	16,97
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	117.301.000	39,83
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	127.200.000	43,19
3.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.675.381.000	22,03
3a.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.083.768.000	23,18





NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PERSEN- TASE
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	95.953.000	8,85
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.015.000	9,22
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan, (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	267.192.000	24,65
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	567.000.000	52,31
	Pengendalian Program KKBPK	53.608.000	4,94
b.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.137.600.000	104,94
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.137.600.000	100
c.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.711.633.000	36,60
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18.900.000	31,10
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	560.893.200	32,76
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	918.239.800	53,64
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15.600.000	0,91
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	198.000.000	11,56
d.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	742.380.000	15,87
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	45.000.000	6,06
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	41.880.000	5,64
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	655.500.000	88,29
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.106.240.000	24,06
4a.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.656.240.000	91,18
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	615.000.000	13,20





NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PERSEN- TASE
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,UPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	75.000.000	1,61
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana(Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.766.240.000	80,88
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50.000.000	1,07
	Promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,Generasi Berencana,Kelanjutusiaan Keuangan Keluarga)	50.000.000	1,07
	Penyediaan Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Terciptanya IPK	100.000.000	0,21
b.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	450.000.000	8,81
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	350.000.000	7,77
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50.000.000	11,11
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	50.000.000	11,11





BAB III CAPAIAN KINERJA

Kinerja DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 merupakan capaian dari rencana yang disusun dalam Penetapan Kinerja yang dibuat oleh masing-masing pelaksana. Penetapan Kinerja merupakan acuan yang harus dilakukan oleh masing-masing pelaksana teknis kegiatan, pada Penetapan Kinerja tergambar secara jelas sasaran yang akan dicapai, indikator output, pada penetapan Kinerja tergambar secara jelas sasaran yang akan dicapai, indikator output secara kuantitatif serta besarnya dukungan dana yang tersedia untuk kurun waktu setahun berjalan.

Sesuai dengan pengukuran capaian kinerja suatu instansi pemerintah maka perlu adanya penilaian terhadap program dan kegiatan serta penyerapan anggaran yang telah dilaksanakan agar diketahui sampai sejauhmana capaian program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan anggaran yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun standard pengukur capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel – 8.
Pengukuran Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

No	Rentang Capaian	Kategori
1	91%≤100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90 %	Tinggi
3	66≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤66 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

I. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TAHUN 2022			KATEGORI
			TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,20	2,39	0,19	Tinggi
2	Meningkatnya peran stakeholder dalam Program BANGGA KENCANA	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program BANGGA KENCANA	30	12	40	Rendah
3	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga	Indek pembangunan Keluarga	57,50	9,33	16,22	Sangat Rendah
4	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP DPPKB	85,10	2,02	106,48	Sangat Tinggi





II. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA PER SASARAN

Berikut capaian kinerja per sasaran yang dilaksanakan DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 dan selama periode RENSTRA (2021 – 2026) :

Sasaran Meningkatnya Kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) kinerja perangkat daerah dilaksanakan bertujuan untuk mendorong terciptanya Angka TFR perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)

Tabel 10

Rumusan Indikator Sasaran 1

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya Kesadaran ber-KB Bagi Pasangan Usia Subur(PUS)	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun)	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$

Tabel 11

Capaian dan Persentase Sasaran 1

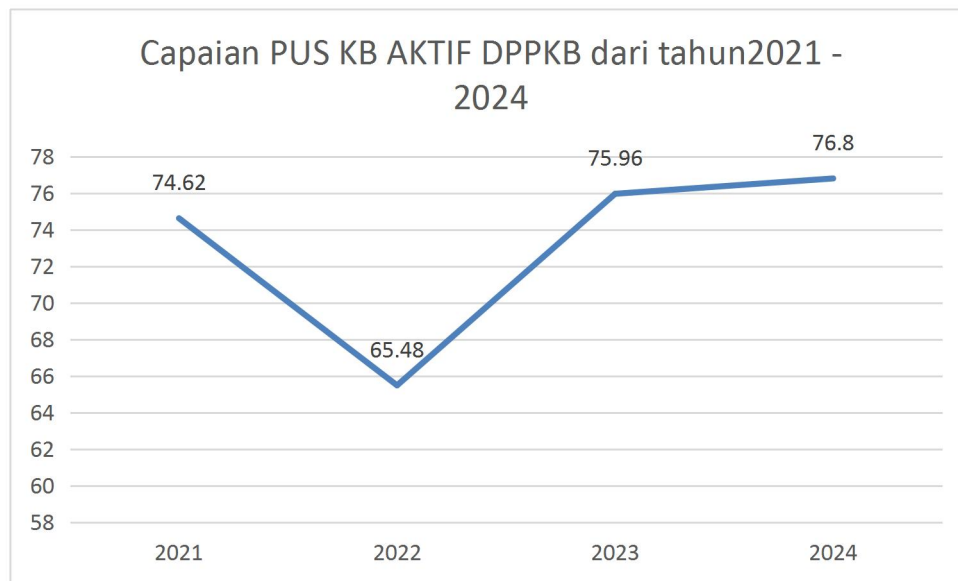
No.	Sasaran	Indikator	Target	Capaian	%
1.	Meningkatnya Kesadaran ber-KB Bagi Pasangan Usia Subur(PUS)	Meningkatnya Kesadaran ber-KB Bagi Pasangan Usia Subur(PUS)	101.802	65870	64,70

Tabel 12

Perbandingan Capaian Indikator Sasaran dalam 5 Tahun terakhir

Indikator Kinerja	Capaian			2024		
	2021	2022	2023	Target	Capaian	%
Meningkatnya Kesadaran ber-KB Bagi Pasangan Usia Subur(PUS)	108.614	65870	100.725	0	0	





Tabel 13

Perbandingan capaian sasaran terhadap capaian rata-rata OPD se-Kukar

Indikator Kinerja	Capaian			Capaian Tertinggi OPD Kukar	Selisih dan persentase terhadap OPD tertinggi
	DPPKB (TARGET)	Nilai Capaian Pus Ber-KB Kukar	Selisih		
Meningkatnya Kesadaran ber-KB Bagi Pasangan Usia Subur(PUS)	101.802	65870	35.932	74,62	-9,14

Adanya wabah COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 berdampak pada pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah tidak terkecuali Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga. Kegiatan pelayanan baik administrasi maupun teknis sesuai dengan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Berencana dilaksanakan dengan menerapkan standard keamanan / mengikuti protocol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan agar pelayanan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta dapat meningkatkan pelayanan yang tertib administrasi dan pelayanan yang berkualitas. Pada tahun 2021 seluruh pekerjaan yang berkontrak sudah dibayarkan 100 % sehingga tidak terdapat beban hutang kepada pihak ketiga.

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian terhadap pekerjaan yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana pada semester pertama telah dilakukan audit / pemeriksaan bersama (joint audit) oleh Kementerian Dalam Negeri dan BKKBN Pusat terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil joint audit tersebut telah ditemukan beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan terhadap administrasi kegiatan dan pengembalian kelebihan pembayaran yang menjadi tanggung jawab pihak rekanan / pelaksana pekerjaan. Sebagai tindak lanjut dari hasil joint audit tersebut telah dilakukan perbaikan administrasi oleh pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran oleh pihak rekanan / pelaksana pekerjaan.





Hal lain dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi telah dibentuk Tim BEKIAS (Bersama Etam Kuatkan Kinerja Aparatur Sipil) yang berperan dalam merumuskan beberapa inovasi untuk menjawab tantangan dan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan public terlebih lagi ditengah pandemic COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini dengan menghadirkan beberapa inovasi yaitu “ TOKO KENCANA “.

TOKO KENCANA merupakan singkatan dari TEMPAT OBROLAN DAN KONSULTASI KELUARGA BERENCANA. Hal ini merupakan suatu Upaya meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam program pembangunan keluarga,kependudukan dan keluarga berencana dengan menyediakan akses komunikasi,informasi dan melalui multi media baik secara offline maupun online agar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya terkait dengan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA)

1. Tujuan Inovasi
2. Keselarasan Dengan Kategori Yang Dipilih
3. Signifikansi (Arti Penting)
4. Inovatif (Kebaruan atau Keunikan atau Keaslian)
5. Transferabilitas (Sifat Dapat Diterapkan Pada Konteks/Tempat Lain
6. Sumber Daya Dan Keberlanjutan
7. Dampak
8. Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Menekankan Kerja sama/Kolaborasi, Keterlibatan, koordinasi, Kemitraan Dan Inklusif)
9. Pelajaran Yang Dipetik





Untuk mendukung sasaran ini, DPPKB ditopang oleh 1 (satu) program, kegiatan, dan sub kegiatan, yaitu:

Tabel 14

Dukungan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya Kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		PERSEN TASE
		ALOKASI	REALISASI	
1.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.675.381.000	3.571.783.660	35,71
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.083.768.000	827.604.891	76,36
	Advokasi Program KKBPK Kepada Stacholder dan Mitra Kerja	95.953.000	84.571.143	88,13
	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak serta Media Luar Ruang	100.015.000	92.580.000	92,56
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK	267.192.000	200.167.000	79,62
	Pengeloan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK	567.000.000	404.488.748	77,68
	Pengendalian Program KKBPK	53.608.000	45.798.0000	85,43
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.137.600.000	1.050.000.000	0,02
	Penggerakan kader Institusi Masyarakat	1.137.600.000	1.050.000.000	92,29





	Pedesaan (IMP)			
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.711.633.000	1.350.181.969	13,50
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaring	18.900.000	7.682.400	40,64
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	560.893.200	415.154.000	74,01
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	918.239.800	814.310.469	88,68
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaring	15.600.000	11.450.000	73,39
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	198.000.000	101.585.100	58,17
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	742.380.000	343.996.800	3,43
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra kerja lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	45.000.000	44.250.000	98,33
	Integritas Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Kb	41.880.000	31.541.000	75,31
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	655.500.000	268.205.800	40,41

Upaya dilakukan DPPKB untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, diantaranya yaitu:

1. Mereview dan merevisi Rencana Strategis DPPKB dalam hal perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi dari Invektorat dan Bappeda
2. Merumuskan *cascading* kinerja dengan menggambarkan sasaran yang akan diwujudkan dengan program kegiatan sebagai upaya mencapai sasaran.
3. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian kinerja utama (*core business*) atau sasaran strategisnya.
4. Monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara terus menerus sehingga perencanaan dan pelaksanaan kinerja dapat ditingkatkan baik efisiensi maupun efektivitasnya.
5. Mengikuti Bimbingan Teknis terkait SAKIP dari PPKK Fisipol UGM yang diadakan di Samarinda

Walaupun capaian kinerja indikator sasaran ini dengan Kategori Sangat Baik, namun masih ada beberapa kendala/hambatan, diantaranya:

1. Koordinasi antar unit kerja yang belum optimal.
2. Banyaknya perubahan regulasi terkait OPD
3. Terbatasnya SDM dan tingginya beban kerja sehingga berpengaruh terhadap pelayanan





2. Sasaran Meningkatnya Peran Stakeholder dalam Program BANGGA KENCANA

Tabel 15
Rumusan Indikator Sasaran 2

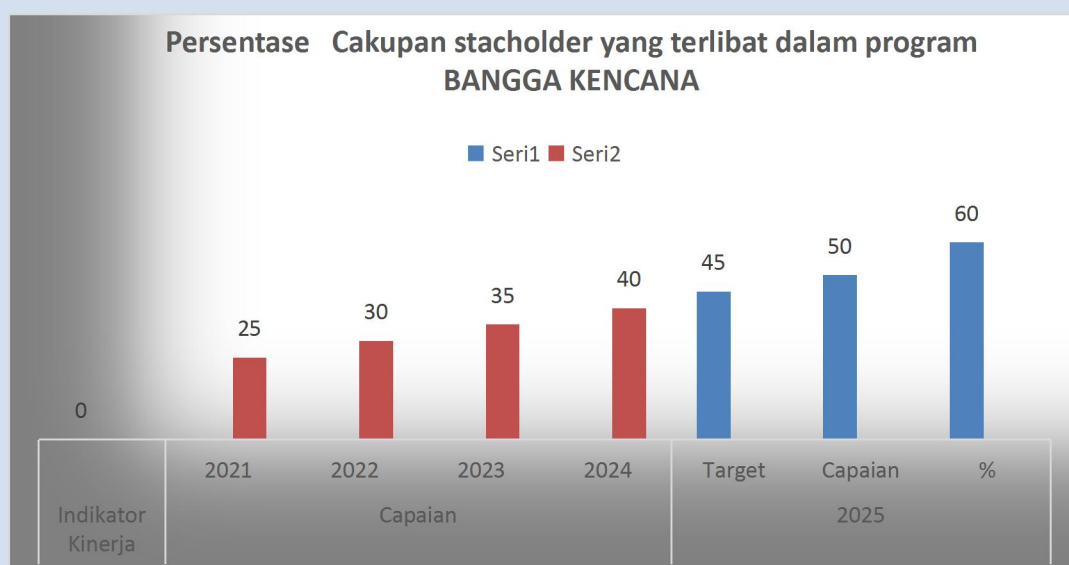
No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya peran stakeholder dalam Program BANGGA KENCANA	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program BANGGA KENCANA	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$

Tabel 16
Capaian dan Persentase Sasaran

No.	Sasaran	Indikator	Target	Capaian	%
1.	Meningkatnya peran stakeholder dalam Program BANGGA KENCANA	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program BANGGA KENCANA	30,00	30,00	35,00

Tabel 17
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran dalam 5 Tahun terakhir

Indikator Kinerja	Capaian				2025		
	2021	2022	2023	2024	Target	Capaian	%
Persentase Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program BANGGA KENCANA	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	60,00





Tabel 18

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		PERSEN TASE
		ALOKASI	REALISASI	
1.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	569.501.000	440.174.191	4,40
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	275.000.000	214.335.691	2,14
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	125.000.000	121.425.691	97,14
	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	50.000.000	20.340.000	40,69
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	50.000.000	49.740.000	99,48
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	50.000.000	22.830.000	45,66
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	294.501.000	225.838.500	2,25
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	50.000.000	23.946.000	47,89
	Penyediaan data dan Informasi Keluarga	117.301.000	90.882.500	77,47
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	127.200.000	111.010.000	87,27

Upaya dilakukan DPPKB untuk mendukung keberhasilan sasaran ini, diantaranya yaitu:

1. Mereview dan merevisi Rencana Strategis DPPKB dalam hal perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi dari Invektorat dan Bappeda
2. Merumuskan *cascading* kinerja dengan menggambarkan sasaran yang akan diwujudkan dengan program kegiatan sebagai upaya mencapai sasaran.
3. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian kinerja utama (*core business*) atau sasaran strategisnya.
4. Monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara terus menerus sehingga perencanaan dan pelaksanaan kinerja dapat ditingkatkan baik efisiensi maupun efektivitasnya.
5. Mengikuti Bimbingan Teknis terkait SAKIP dari PPKK Fisipol UGM yang diadakan di Samarinda

Walaupun capaian kinerja indikator sasaran ini dengan Kategori Sangat Baik, namun masih ada beberapa kendala/hambatan, diantaranya:

1. Koordinasi antar unit kerja yang belum optimal.
2. Banyaknya perubahan regulasi terkait OPD.
3. Terbatasnya SDM dan tingginya beban kerja sehingga berpengaruh terhadap pelayanan





3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga

Tabel 19
Rumusan Indikator Sasaran 3

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga	Indek Pembangunan Keluarga	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$

Tabel 20
Capaian dan Persentase Sasaran 3

No.	Sasaran	Indikator	Target	Capaian	%
1.	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kualitas Kesejahteraan Keluarga	57,50	58,60	60,19

Tabel 21
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran dalam 5 Tahun terakhir

Indikator Kinerja	Capaian				2025		
	2021	2022	2023	2024	Target	Capaian	%
Persentase Kualitas Kesejahteraan keluarga	57,00 %	57,50 %	50,58 %	60,00%	63,00%	64,00%	63,00%



Tabel 22





NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		PERSEN TASE
		ALOKASI	REALISASI	
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	5.106.240.000	2.867.120.943	28,67
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.656.240.000	2.689.375.943	26,89
	Pengadaan sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	615.000.000	501.955.288	81,61
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	75.000.000	45.522.000	60,69
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana(Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.766.240.000	2.036.285.055	54,06
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi/UPPKS)	50.000.000	34.880.000	69,76
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(Menjadi Orang Tua Hebat,Generasi Berencana,Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	50.000.000	49.423.600	98,82
	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang mendukung terciptanya IPK	100.000.000	21.310.000	21,31
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	450.000.000	177.745.000	1,77
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	350.000.000	111.815.000	31,94
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50.000.000	40.705.000	81,41
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra kerja Keluarga bagi Mitra Kerja	50.000.000	25.225.000	50,45





4. Sasaran Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas Kinerja

Tabel 23

Rumusan Indikator Sasaran 4

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP DPPKB	$\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target}$

Table 24

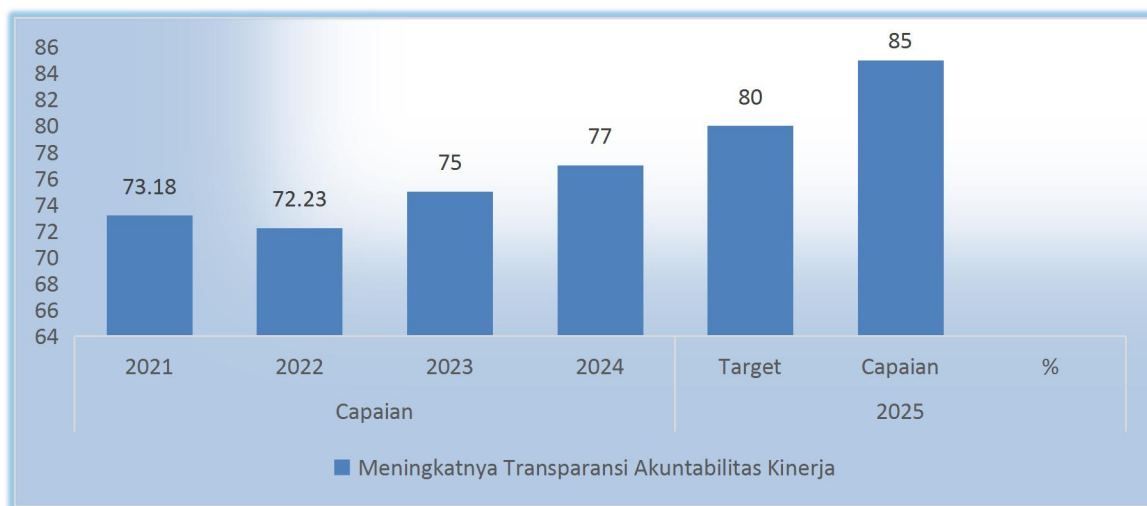
Capaian dan Persentase Sasaran 4

No.	Sasaran	Indikator	Target	Capaian	%
1.	Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP DPPKB	85,10	72,23	

Tabel 25

Perbandingan Capaian Indikator Sasaran dalam 5 Tahun terakhir

Indikator Kinerja	Capaian				2025		
	2021	2022	2023	2024	Target	Capaian	%
Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas Kinerja	73,18	72,23	75,00	77,00	80,00	85,00	



Tabel 26

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		PERSEN TASE
		ALOKASI	REALISASI	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.863.756.966	9.546.688.942	95,45
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	281.684.000	235.981.750	2,35





	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	138.468.000	122.888.500	88,74
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	35.880.000	32.695.900	92,70
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.360.00	17.799.800	70,18
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.976.000	62.597.550	76,36
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.535.762.621	6.460.673.783	64,60
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.132.835.621	6.406.384.006	89,81
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000	15.000.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31.342.000	28.948.200	92,36
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD	346.585.000	341.577.000	98,55
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	10.000.000	100
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	104.570.000	103.080.000	1,03
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	74.570.000	74.570.000	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	30.000.000	28.510.000	95,03
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.888.000	14.259.000	14,25
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	59.888.000	14.259.000	23,80
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	455.693.618	443.111.850	4,43
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135.000.000	126.416.472	93,64
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	49.925.000	99,85
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	19.999.800	19.999.800	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.200.818	208.729.578	99,77
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	41.493.000	38.041.000	9,10
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	385.545.900	376.432.490	3,76
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000	69.526.820	92,70
	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	200.000.000	198.107.020	99,45
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.545.900	108.798.650	98,41
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.758.983.348	1.657.554.706	16,57
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.091.040	137.049.514	87,80
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	50.000.000	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.552.892.308	1.470.505.192	94,69
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.629.479	255.595.363	2,55
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	44.830.000	44.699.500	99,70





	Kendaraan Dinas Jabatan			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.775.578	77.418.633	75,32
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134.023.901	133.477.230	99,59





III. REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Tabel 27
Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DPPKB Tahun 2022

NO.	RINCIAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE	TINGKAT EFISIEN
1.	Belanja Operasi	5.752.709.432,00	12.913.114.877,00	81,97	18,03
2.	Belanja Modal	2.200.568.369,00	2.092.041.300,00	95,07	4,93
	Jumlah	17.953.277.801,00	15.005.156.177,00	83,58	16,42

Tabel 28
Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DPPKB Tahun 2022

No.	Uraian	Kinerja			Anggaran		Persentase Penyerapan	Tingkat Efisiensi
		Target	Capaian	%	Pagu	Realisasi		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85	73	85,88	10.863.756.966	9.546.688.942	95,45	10,07
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100	100	100	281.684.000	235.981.750	2,35	11,34
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80	80	100	138.468.000	122.888.500	88,74	2,28
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	80	80	100	35.880.000	32.695.900	92,70	7,76
	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85	80	100	25.360.000	17.799.800	70,18	5,04
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40	80	200	81.976.000	62.597.550	76,36	23,95
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100	100	100	7.535.762.621	6.460.673.183	64,60	71,62
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	100	7.132.835.621	6.406.384.006	89,81	11,84
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	100	100	15.000.000	15.000.000	100	0
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100	31.342.000	28.948.200	92,36	6,62

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40	40	100	346.585.000	341.577.000	98,55	8,89
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100	100	100	10.000.000	10.000.000	100	0
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	104.570.000	103.080.000	1,03	0,14
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100	74.570.000	74.570.000	100	0
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100	30.000.000	28.510.000	95,03	0,56
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	59.888.000	14.259.000	14,25	24,64
	BimbinganTeknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25	1	0,04	59.888.000	14.259.000	23,80	22,76
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	455.693.618	433.111.850	4,43	3,87
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30	10	0,3	70.6924.000	49.844.000	7,05	92,95
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	1	100	235.209.355	234.548.769	99,72	0,28
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	30	20	0,6	1.969.825.448	58.780.000	93,62	6,38
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	100	209.200.818	208.729.578	99,77	85,45
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	100	100	41.493.000	38.041.000	9,10	7,89
	Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90	100	11,1	385.545.900	376.432.490	3,76	8,47
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80	80	100	75.000.000	69.526.820	92,70	18,93
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90	90	100	200.000.000	198.107.020	99,45	0,07
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	100	100	110.545.900	108.798.650	98,41	7,74
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75	75	100	1.758.983.348	1.657.554.706	16,57	10,8
	Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	80	60	75	156.091.040	137.049.514	87,80	85,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100	100	50.000.000	50.000.000	100	0

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70	60	85,71	1.552.892.308	1.470.505.192	94,69	17,18
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				281.629.479	255.595.363	2,55	5,77
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	100	100	44.830.000	44.699.500	99,70	87,45
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas OPERasional atau Lapangan	100	100	100	102.775.578	77.418.633	75,32	65,98
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	100	100	100	134.023.901	133.477.230	99,59	88,55
2.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	80	70	87,5	569.501.00	440.174.191	4,40	4,97
	<i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>	80	80	100	275.000.000	214.335.691	2,14	7,90
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	1	100	125.000.000	121.425.691	97,14	80,78
	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	3	4	1,3	50.000.000	20.340.000	40,69	33,43
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	75	80	85	50.000.000	49.740.000	99,48	88,79
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	67	70	65	50.000.000	22.830.000	45,66	66,89
	<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	60	60	100	294.501.000	225.838.500	2,25	2,98
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	10000	2000	0,2	50.000.000	23.9446.000	47,89	19,57
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	100	100	100	117.301.000	90.882.500	77,47	75,00
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	16500	16000	96,97	127.200.000	111.010.000	87,27	10,03



3.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	100	100	100	4.675.381.000	3.571.783.660	35,71	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100	100	100	1.083.768.000	827.604.891	76,36	66,90
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100	100	100	95.953.000	84.571.143	88,13	79,99
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Mitra Kerja	100	100	100	100.015.000	92.580.000	92,56	88,08
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK	100	100	100	267.192.000	200.167.000	79,62	63,77
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	100	100	100	567.000.000	404.488.748	77,68	60,43
	Pengendalian Program KKBPK	100	100	100	53.608.000	45.798.000	85,43	79,55
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100	100	100	1.137.600.000	1.050.000.000	0,02	20,89
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100	100	100	1.137.600.000	1.050.000.000	79,11	20,89
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	1.711.633.000	1.350.181.969	13,50	17,31
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	90	90	100	18.900.000	7.682.400	40,64	38,36
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	75	75	100	560.893.200	415.310.469	74,01	49
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	5	0	5	918.239.800	814.310.469	88,68	3,59
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya	90	80	75	15.600.000	11.450.000	73,39	67,85
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	80	66	60	198.000.000	101.585.100	58,17	54,00



	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100	100	100	742.380.000	343.996.800	3,43	2,60
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0	0	0	45.000.000	44.250.000	98,33	8,09
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	80	75	85	41.880.000	31.541.000	75,31	67,55
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	77	70	65	655.500.000	268.205.800	40,41	33,56
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				5.106.240.000	2.867.120.943	28,67	27,45
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	100	100	4.656.240.000	2.689.375.943	26,89	0
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	17	0	0	615.000.000	501.955.288	81,61	77,13
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	5	0	0	75.000.000	45.522.000	60,69	55,00
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2	79	39,5	3.766.240.000	2.036.285.055	54,06	45,05
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4	2	0,5	50.000.000	34.880.000	69,76	67,38

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keluarga)	65	45	50	50.000.000	49.423.600	98,82	6,35
Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Terciptanya IPK				100.000.000	21.310.000	21,31	20
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	50	20	40	450.000.000	177.745.000	1,71	1,1
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	60	45	40	350.000.000	111.815.000	31,94	2,55
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	40	40	100	50.000.000	40.705.000	81,41	7,45
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	50	30	25	50.000.000	25.225.000	50,45	25,5



IV. CAPAIAN DAN EFISIENSI PENCAPAIAN SASARAN

Tabel 29
Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya kesadaran ber-KB Pasangan Usia Subur	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun)	2,20	2,39	108,63	4.698.608.000	4.675.381.000	99,50
2.	Meningkatnya peran stakeholder dalam Program BANGGA KENCANA	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program BANGGA KENCANA	30	12	40	542.795.000	546.501.000	100,68
3.	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga	Indek Pembangunan Keluarga	57,50	9,33	16,22	5.106.240.000	5.106.240.000	100
4.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP DPPKB	85,10	2,02	4,21	11.155.460.041	10.863.756.966	97,38

Sasaran 1

Meningkatnya Kesadaran ber-KB Pasangan Usia Subur

Sasaran 1 yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki indikator berupa persentase Keluarga Berencana aktif per Pasangan Usia Subur (PUS). Pada tahun 2022 target untuk Keluarga Berencana Aktif Per Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 2,20% dengan realisasi sebesar 2,39% atau capaian target sebesar 2,39 %. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 75,40 % maka terjadi penurunan sebesar 3,42 % pada tahun 2022 dengan jumlah Peserta KB Aktif sebanyak 65.870 orang dan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 100.590 orang.



Gambar – 2.

Pelayanan KB Dalam Rangka Meningkatkan Angka Kesertaan Ber-KB Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Capaian meningkatnya peserta KB Aktif per Pasangan Usia Subur (PUS) adalah sebagai berikut :

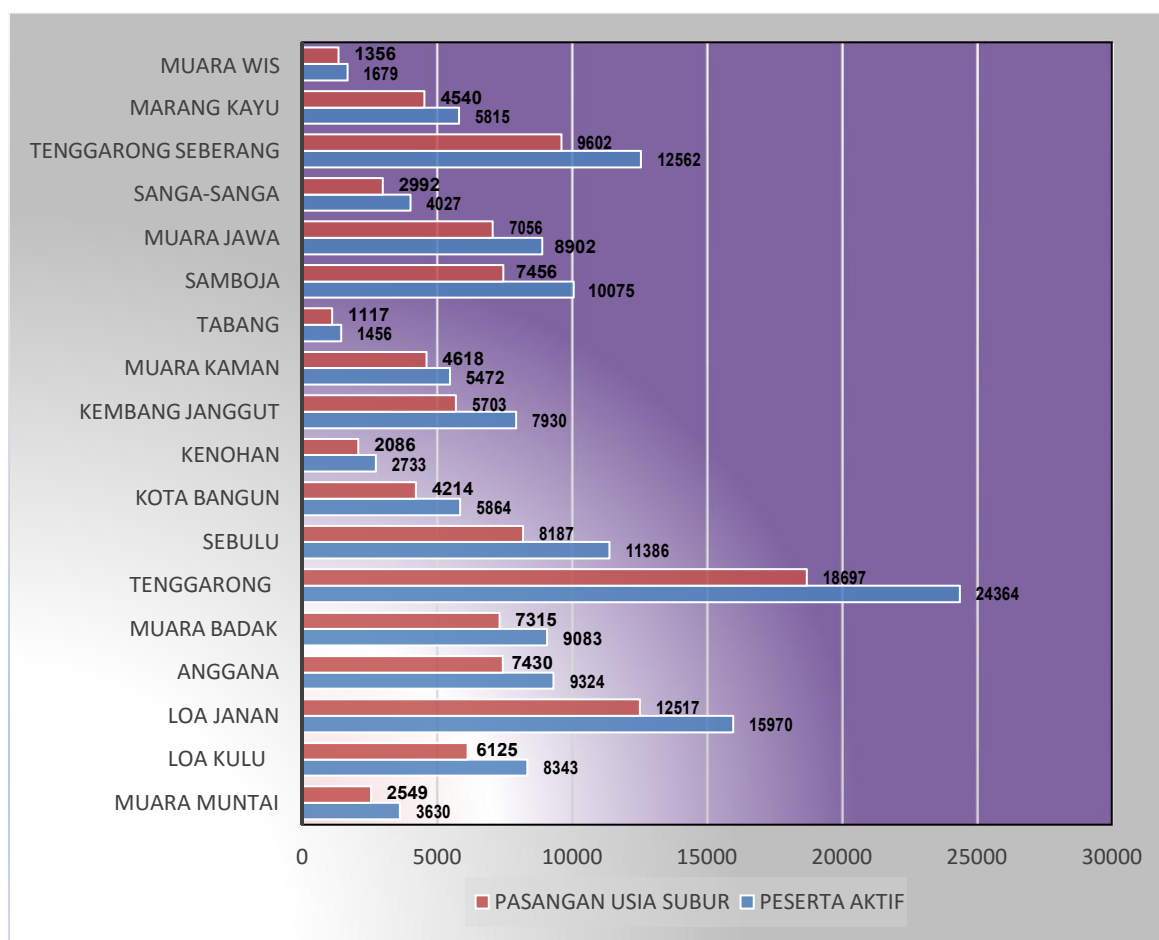
Tabel – 30.
Formulir Pengukuran Kinerja
Sasaran 2

Indikator Sasaran	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Keluarga Berencana Aktif Per Pasangan Usia Subur (PUS)	2,24	2,22	2,20	2,39	2,18		2,16		2,14	



Grafik – 1.
Persentase Keluarga Berencana Aktif
Per Pasangan Usia Subur (PUS) Tahun 2019 – 2022

Berdasarkan hasil pendataan terhadap pencapaian peserta KB Aktif di Kabupaten tercatat jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 100.590 dan jumlah real peserta aktif KB sebanyak 65.870. Secara terinci capaian peserta KB aktif untuk masing-masing kecamatan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik – 2.
Jumlah Peserta KB Aktif Di Setiap Kecamatan
Pada Tahun 2022

Pasangan Usia Subur (PUS) terbanyak ada di Kecamatan Tenggarong dengan jumlah 11.386 sedangkan untuk PUS yang paling sedikit ada di Kecamatan

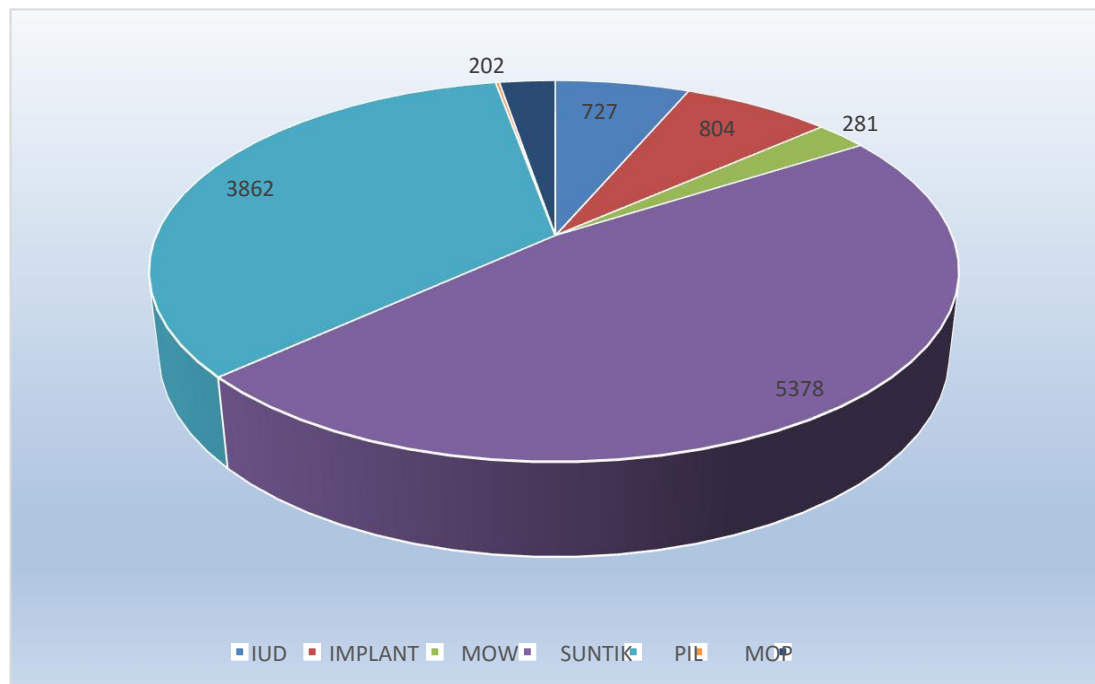
Muara wis dengan jumlah 1.455. Untuk tingkat capaian Peserta KB Aktif tertinggi ada di Kecamatan Tenggarong dengan CPR sebesar 85,25% dan terendah ada di Kecamatan Kota Bangun dengan CPR sebesar 59,50%.

Berdasarkan jenis kontrasepsi yang dibedakan menjadi 2 jenis yaitu Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP. Untuk pengguna MKJP di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 tercatat sebanyak 19.769 orang menggunakan metode





MKJP terdiri dari 8.644 orang menggunakan IUD, 7.741 orang menggunakan implant dan 3.202 orang menggunakan Metode Operasi Wanita (MOW) serta 182 orang menggunakan Metode Operasi Pria (MOP). Sedangkan untuk Non MKJP sebanyak 88.845 orang dengan rincian sebanyak 49.356 orang menggunakan suntik, pil sebanyak 36.360 orang dan sebanyak 3.129 orang menggunakan kondom. Sehingga jika dilihat dari angka tersebut sampai saat ini kontrasepsi jenis suntik masih banyak diminati oleh akseptor KB di masyarakat, selanjutnya adalah jenis kontrasepsi pil, implant, IUD, Kondom, MOW dan MOP.



Grafik – 3.
Komposisi Jenis Kontrasepsi Yang Digunakan Akseptor KB
Di Kabupaten Kutai Kartanegara Pada Tahun 2022

Sasaran 3

Meningkatnya aksesibilitas keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dalam program Keluarga Berencana

Untuk indikator Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Pra Sejahtera I yang ikut ber Keluarga Berencana pada tahun 2022 mencapai angka **9,33 %** dari target sebesar **15,50 %** atau tercapai sebesar **60,16 %**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar **47,48 %** maka terjadi kenaikan sebesar **1,26 %**.

Beberapa upaya terus dilakukan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I dalam program Keluarga Berencana diantaranya melalui kegiatan advokasi, komunikasi dan edukasi khususnya yang berada di Kampung KB dimana banyak terdapat keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1. Pelayanan Keluarga Berencana yang lebih mengarah kepada kelompok keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I diharapkan mampu meningkatkan angka peserta Keluarga Berencana dari kelompok ini.





Gambar – 4.
Pelayanan KB Gratis

Adapun permasalahan yang dihadapi di tahun 2022 terhadap pencapaian Sasaran 2 dan Sasaran 3 keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 orang per 2 Desa masih belum terlaksana. Petugas kita sangat kurang di banding dengan letak geografis Kabupaten Kutai Kartanegara dan jumlah desa yang ada. Karena jarak dan akses antar Desa sangat jauh dan sulit dicapai baik dari jalur darat maupun jalur sungai. Sampai saat ini jumlah PLKB dan PKB di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana terinci dibawah ini :

Tabel - 31
Jumlah PLKB dan PKB

Jabatan	PNS	Non PNS	Jumlah
PLKB	-	34	34
PKB	13	-	13
Jumlah	13	34	47

Jumlah Desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 237 desa, apabila setiap 2 Desa / Kelurahan minimal memiliki 1 orang PLKB / PKB maka kebutuhan PLKB / PKB di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 21 orang. Jika saat ini jumlah PLKB / PKB yang ada sebanyak 67 orang maka masih terdapat kekurangan tenaga PLKB / PKB sebanyak 51 orang dan untuk mengantisipasi beberapa orang yang akan memasuki purna tugas maka sampai tahun 2022 diperlukan tenaga PLKB / PKB sebanyak 87 orang. Jika dihitung rasio PLKB / PKB yang ada saat ini di Kabupaten Kutai Kartanegara baru mencapai angka 3,2 dimana 1 orang PLKB / PKB masih menangani sebanyak 3 (Tiga) Desa yang idealnya untuk 1 orang PLKB / PKB hanya menangani 2 (Dua) Desa.

2. Masih minimnya ketersediaan database dibidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Kutai Kartanegara.





V. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Berdasarkan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan alokasi anggaran semula sebesar Rp. 16.829.958.199,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 19.473.324.625,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.741.544.341,00 untuk mendukung pelaksanaan 4 (Empat) Program dan 16 (Enam belas kegiatan) 57 (Lima Puluh Tujuh) Sub Kegiatan.

Adapun realisasi keuangan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 15.287.458.742,00 (78,50 %) dan realisasi keuangan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 1.542.499.457,00 (88,57 %). Realisasi belanja secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 16.829.958.199,00 dari total anggaran sebesar Rp. 21.214.868.966,00 atau sebesar 79,33 %.

Tabel – 32.
Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	19.473.324.625,00	15.287.458.742,00	78,50
2	Belanja Modal	1.741.544.341,00	1.542.499.457,00	88,57
	Total	21.214.868.966,00	16.829.958.199,00	79,33





BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) beserta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dalam rangka memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan LKjIP sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini menyajikan capaian kinerja DPPKB selama Tahun 2022. Capaian kinerja (performance results) DPPKB Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) dan rencana kegiatan sebagai tolok ukur keberhasilan DPPKB dalam tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penanaman modal. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

LKjIP DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, di bidang Penanaman Modal. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas DPPKB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government).

Sangat disadari bahwa LKjIP DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini masih belum sempurna. Sehubungan dengan itu masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan LKjIP sangat diharapkan sehingga untuk tahun-tahun selanjutnya akan menjadi lebih baik.

Tenggarong, 24 Pebruari 2022

Kepala,


Drs. Adinur, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650210 199003 1 016





LAMPIRAN



Lampiran 1. Hasil Evaluasi SAKIP DPPKB

No	Komponen	Bobot (%)	NILAI ANGKA		Peningkatan/ (Penurunan)
			Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Perencanaan Kinerja	30	25,96	26,52	0,56
2	Pengukuran Kinerja	25	14,69	15,31	0,62
3	Pelaporan Kinerja	15	11,29	12,04	0,75
4	Evaluasi Internal	10	2,71	4,00	1,29
5	Capaian Sasaran Kinerja	20	14,38	15,31	(0,94)
Total		100	69,03	73,18	4,15
Kategori Interpretasi			B Baik	BB Sangat Baik	

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja DPPKB Tahun 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. ADINUR, M. AP**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si**
Jabatan : **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

- Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRAT) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
- Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektoriat Daerah;
- Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
- Melaksanakan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP tepat waktu dan berkesesuaian;
- Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

- Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
- Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.
- Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- Terealisasi Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
- Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

- Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini;
- Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua, **BUPATI KUTAI KARTANEGARA** Pihak Pertama, **KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si **Drs. ADINUR, M. AP**
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630210 199603 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun)	Persen	2,20
2	Meningkatnya peran stakeholder dalam Program BANGGA KENCANA	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program BANGGA KENCANA	Persen	30
3	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga	Indek Pembangunan Keluarga	Nilai	57,50
4	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP DPPKB	Nilai	85,10
		Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektoriat pada tahun berjalan maka wajib untuk diindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Pencusuran	Persen	100
		Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SIRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100

	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70
5	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen 100
6	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	Jumlah Inovasi	Jumlah 1
7	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen 100
8	Terealisasi Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen 100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	11.155.460.041,-	APBD
2.	Program Pengendalian Penduduk	542.795.000,-	APBD + DAK
3.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	4.698.608.000,-	APBD + DAK
4.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	5.106.240.000,-	APBD + DAK
JUMLAH ANGGARAN		21.503.103.041,-	APBD + DAK

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua, **BUPATI KUTAI KARTANEGARA** Pihak Pertama, **KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si **Drs. ADINUR, M. AP**
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630210 199603 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. MASTUKHAH, M.Si**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. ADINUR, M.AP**
Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

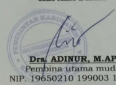
- Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana teruang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
- Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
- Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
- Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
- Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
- Tereslisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
- Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
- Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

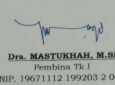
Pihak kedua:

- Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
- Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

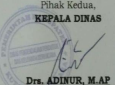
Pihak Kedua, **KEPALA DINAS**

Drs. ADINUR, M.AP
Pembina utama muda
NIP. 19650210 199003 1 016

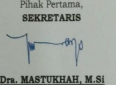
Pihak Pertama, **SEKRETARIS**

Drs. MASTUKHAH, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19671112 199203 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK AND KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA				
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor	Persen	90
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Mutu	B
4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
5	Tereslisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA			
NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	273.224.000	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.724.712.855	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	104.570.000	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	429.374.300	APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah	341.975.000	APBD
6	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.001.032.308	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	220.683.578	APBD
8	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.888.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		11.155.460.041	

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua, **KEPALA DINAS**

Drs. ADINUR, M.AP
Pembina utama muda
NIP. 19650210 199003 1 016

Pihak Pertama, **SEKRETARIS**

Drs. MASTUKHAH, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19671112 199203 2 007

Lampiran 3. Publikasi Perjanjian Kinerja Tahun 2022



Lampiran 4. Pengukuran Kinerja DPPKB Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TAHUN 2022			KATEGORI
			TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kesadaran <u>ber-KB</u> bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,20	2,39	0,19	Tinggi
2	Meningkatnya peran <u>stakeholder</u> dalam Program BANGGA KENCANA	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program BANGGA KENCANA	30	12	40	Rendah
3	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga	<u>Indek</u> pembangunan Keluarga	57,50	9,33	16,22	Sangat Rendah
4	Meningkatnya <u>transparansi</u> dan <u>akuntabilitas</u> Kinerja	Nilai SAKIP DPPKB	85,10	2,02	106,48	Sangat Tinggi

lampiran 6. Pohon Kinerja 2022



Lampiran 7. Rencana Aksi Tahun 2022

RENCANA AKSI KINERJA
PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2022

Sasaran	RENCANA AKSI											
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Waktu Pelaksanaan Triwulan				Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja DPPKB												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85	Rp 11,724,150,922.00	0	0	85	0	SEKRETARIS
					Persen	100		100	0	0	0	
				Persentase Ketepatan Input RUP pada Aplikasi SIRUP	Nilai	100		100	0	0	0	
				Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKP per Tanggal 31 Maret 2023	Persen	100		100	0	0	0	
				Tingkat Kepatuhan LHKASIN per Tanggal 31 Maret 2023	Persen	100		100	0	0	0	
				Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai	65		0	0	65	0	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja DPPKB	Dokumen	177	Rp 400,000,000.00	177	177	177	177	SEKRETARIS
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	5.00	Rp. 150,000.000	5	0	0	0	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	40.00	Rp. 50,000.000	40	0	0	0	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-P	Dokumen	20.00	Rp. 20,000.000	0	0	20	0	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	Laporan	12.00	Rp. 30,000.000	3	3	3	3	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	40.00	Rp. 15,000.000	0	0	0	40	